

PENGARUH PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN DAN BEA BALIKNAMA TERHADAPPENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Periansya¹⁾, Diah Elvina²⁾, Desi Indriasari³⁾
Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya
e-Mail : periansya@polsri.ac.id

Abstract

This study aims to analysis the effect of Vehicle Tax (PKB) and Vehicle Transfer Tax (BBNKB) to Regional Own Source Revenue (PAD) in South Sumatera Province. The data used are time series data for the period of 2013-2016 which is presented monthly from January to December, using documentation method done at Regional Revenue Board (Bapenda) of South Sumatera Province. Sample in this research using samples saturated. The results of this study indicate that partially PKB variable positively and significantly influence to PAD in South Sumatera Province year 2013-2016, while variable of BBNKB have no significant influence to PAD in South Sumatera Province year 2013-2016, and simultaneously PKB and BBNKB positively and significantly influence to PAD in South Sumatera Province in 2013-2016.

Keywords: *Vehicle Tax, Vehicle Transfer Tax, Regional Own Source Revenue*

1. PENDAHULUAN

Salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin besar penerimaan PAD suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Sebaliknya, semakin rendah penerimaan PAD suatu daerah maka semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri. (Altius, dkk, 2013:105).

Salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat diandalkan yaitu dari sektor perpajakan adalah pajak daerah. Pemerintah daerah terus berusaha meningkatkan pendapatan daerahnya dengan cara memaksimalkan pajak daerah, yaitu seperti pajak provinsi misalnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Pajak daerah yang memberikan kontribusi yang cukup besar dalam penerimaan pajak yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Meningkatnya tingkat pendapatan masyarakat dapat ditandai dengan naiknya jumlah kendaraan bermotor yang ada dimasyarakat.

Tabel 1.1 Penerimaan PKB dan BBN-KB di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2016

Tahun	Pajak Kendaraan Bermotor	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
2013	646.935.936.628	704.556.680.844
2014	683.799.870.580	723.324.643.993
2015	785.782.561.471	596.462.294.191
2016	847.090.434.266	526.209.192.157

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumsel, 2017

Berdasarkan data diatas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, tetapi untuk penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mengalami fluktuasi. Jumlah kendaraan bermotor yang sangat besar jumlahnya di Provinsi Sumatera Selatan maka diharapkan sangat berpengaruh terhadap penerimaan PKB dan BBNKB, tetapi kenyataannya hasil didapatkan belum optimal. Hal tersebut dikarenakan

banyaknya wajib pajak yang tidak mendaftar ulang, tidak optimalnya penerapan pajak progresif, adanya mobil-mobil selundupan yang belum teregistrasi oleh Bapenda sebagai potensi pajak, serta adanya peminjaman KTP dan tembak KTP dalam proses perpanjangan STNK sehingga mengurangi potensi perolehan BBNKB. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul analisis pengaruh pajak kendaraan

bemotor dan bea balik nama terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

2.TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Menurut Andriani (2015: 3) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak Daerah

Menurut Perda Provinsi Sumatera Selatan No. 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menyebutkan bahwa pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Pajak daerah dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Selatan No. 3 Tahun 2011, Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat menjadi PKB, merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan atas kendaraan bermotor. Objek Pajak Kendaraan Bermotor, yang menjadi objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor yang beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan disemua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang beroperasi di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Menurut Perda Provinsi Sumsel No.3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, menjelaskan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat dengan BBN-KB adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan atau penggantian hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat yang terjadi dari perjanjian dua pihak atau sepihak atau keadaan yang terjadi karena transaksi jual beli, warisan, tukar menukar, hibah, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Objek Pajak BBN-KB adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor. Subjek Pajak BBN-KB adalah orang pribadi, badan, atau instansi

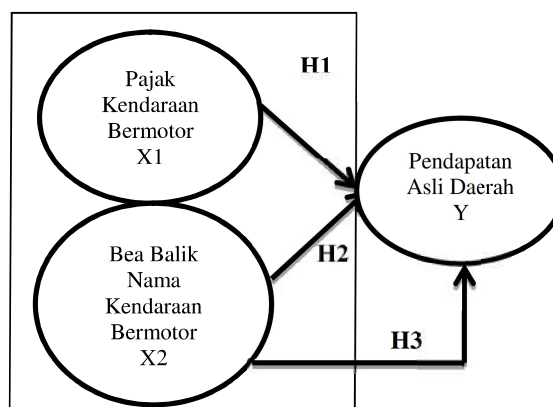
pemerintah yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor.

Pajak Progresif

Pasal 8 ayat 1 dan 2 perda provinsi sumsel no 3 Tahun 2011 menyebutkan Kepemilikan kendaraan bermotor pribadi kedua dan seterusnya dikarenakan tarif secara progresif. Sedangkan pada pasal 3 ayat 8 Pengenaan tarif PKB secara progresif ini tidak dikenakan pada kepemilikan kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, dikecualikan untuk kendaraan bermotor milik badan dan motor besar dengan isi silinder atau satuan tenaga 500 cc keatas.

Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan UU NO 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah pada pasal 1 angka 18 menyebutkan Pendapatan asli daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan".Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah dapat dikelompokkan yaitu: a) Pajak Daerah, b) Retribusi Daerah, c) Bagian Laba Usaha Daerah, dan d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dibuat, analisis hipotesis terhadap masalah yang dibahas ialah sebagai berikut:

- H1: Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah
- H2: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah
- H3: Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh Positif terhadap Pendapatan Asli Daerah

3. METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2013-2016 yaitu data penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pendapatan Asli Daerah yang disajikan secara perbulan. Sedangkan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2013-2016.

Variabel Penelitian

Variabel Independen

Variabel bebas (*Independent Variable*) adalah variabel yang menjadi sebab timbul atau berubahnya suatu variabel terikat (*Dependent Variable*). (Sugiono, 2007: 3). Jadi kesimpulannya variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi, variabel bebas dalam penelitian ini yaitu :

1. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dikenakan atas penguasaan dan atau kepemilikan terhadap kendaraan bermotor (Perda Sumatera Selatan No.3 Tahun 2011). Variabel ini dinyatakan dalam satuan Rupiah (Rp).

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan atau penggantian hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat yang terjadi dari perjanjian dua pihak atau sepihak atau keadaan yang terjadi karena transaksi jual beli, warisan, tukar menukar, hibah, atau pemasukan ke dalam badan usaha (Perda Sumatera Selatan No.3 Tahun 2011). Variabel ini dinyatakan dalam satuan Rupiah (Rp).

Variabel Dependen

Variabel terikat (*Dependent Variable*) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2007:3). Variabel terikat pada penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan pendapatan yang diterima daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan (Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004). Besarnya Penerimaan PAD di Provinsi Sumsel dinyatakan dalam satuan Rupiah (Rp).

Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian merupakan bagian dari proses pengujian data setelah tahap pemilihan dan pengumpulan data dalam penelitian. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program SPSS (*Statistical Package for Social Science*) versi 20.

Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian ini antara lain: penyiapan data dalam bentuk tabel, grafik, perhitungan *median*, *mean*, standar deviasi, dan lain-lain. Hal ini diperlukan untuk melihat gambaran secara menyeluruh mengenai data yang telah dikumpulkan dan memenuhi syarat untuk dijadikan sampel penelitian. Uji atas data yang dilakukan seperti, Uji Asumsi Klasik, Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas dan Uji Autokorelasi. Pada penelitian ini menggunakan analisis regresi. Rumus koefisien regresi adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan :

- Y : Pendapatan Asli Daerah
- α : Konstanta
- X1 : Pajak Kendaraan Bermotor
- X2 : Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- β_1, β_2 : Koefisien regresi untuk X1 dan X2
- e : *error term*

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

uji koefisien determinasi (R^2) menurut Priyatno, (2012: 134) bertujuan untuk menentukan proporsi atau persentase total variasi dalam variabel terikat yang diterangkan oleh variabel bebas.

Uji Hipotesis

Uji t (Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui signifikan tidaknya pengaruh dari masing-masing variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) (Sanusi, 2011:138).

Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Menurut Ghozali (2013:98), pada derajat kepercayaan 5% apabila nilai F lebih besar dari 4 maka H_0 dapat ditolak dan H_a diterima. Jika nilai F lebih kecil dari 4 maka H_0 diterimadan H_a ditolak.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan data Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2013 sampai tahun 2016, dihitung dari bulan januari sampai desember totalnya 48 bulan. Hasil statistik deskriptif memberikan gambaran seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Kendaraan Bermotor	48	45277757840	1,04E+11	61741850061	9980743971
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	48	35759019075	78895575258	53136516900	8684221875
Pendapatan Asli Daerah	48	1,44E+11	3,07E+11	2,0041E+11	32557330181
Valid N (listwise)	48				

Sumber : Data yang diolah dari SPSS versi 20, 2017

Pada tabel 4.1 diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah data (N) setiap variabel adalah sebanyak 48 dan penjelasan dari masing-masing variabel sebagai berikut:

1. Nilai minimum dari Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel dependen (Y) adalah Rp 144.353.816.418,75 artinya PAD pada tahun 2013-2016 yang terendah adalah Rp 144.353.816.418,75. Nilai maksimum PAD sebesar Rp 306.784.561.290,74. Nilai rata-rata (Mean) PAD sebesar Rp 200.411.572.199,8884. Sedangkan nilai simpangan (*Standard Deviation*) adalah sebesar Rp 32.557.330.180,73850.
2. Variabel dari Pajak Kendaraan Bermotor sebagai variabel X_1 dengan nilai minimum dari PKB adalah sebesar Rp 45.277.757.840,00. Nilai maksimum PKB sebesar Rp 104.251.111.973,00. Nilai rata-rata (Mean) PKB sebesar Rp 61.741.850.061,3542. Sedangkan nilai simpangan (*Standard Deviation*) adalah Rp 9.980.743.970,91074.
3. Variabel dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagai variabel X_2 dengan nilai minimum dari BBNKB adalah sebesar Rp 35.759.019.075,00. Nilai maksimum BBNKB adalah sebesar Rp 78.895.575.258,00. Nilai rata-rata (Mean) adalah sebesar Rp 53.136.516.899,6875. Sedangkan nilai simpangan (*Standard Deviation*) adalah Rp 8.684.221.874,79483.

Uji Normalitas dan Uji Multikolinieritas

Berdasarkan hasil pengujian t disimpulkan bahwa secara bersama-sama sudah terdistribusi secara normal yaitu sebesar 0,336 telah memenuhi syarat normal yaitu diatas 0,05 atau 5%. Sedangkan dari analisis multikolinieritas dengan menggunakan SPSS Versi 20 menunjukkan bahwa nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dari PKB sebesar 1,091 dengan nilai *tolerance* 0,916, dan nilai VIF BBNKB sebesar 1,091 dengan nilai *tolerance* 0,916. Nilai VIF untuk semua variabel independen VIF < 10, dan nilai *tolerance* > 0,1. Maka dapat disimpulkan bahwa kedua variabel independen penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas dan Uji Auto Kolerasi

Uji Heteroskedastisitas memberikan hasil bahwa titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk pola tertentu yang jelas (menyempit), dan tidak ada pola yang jelas. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi belum layak dipakai untuk analisis selanjutnya. Sedangkan Hasil dari pengujian autokorelasi dalam penelitian ini menunjukkan nilai Durbin Watson adalah 1,486 dan diketahui nilai d_u dan d_l untuk $K=2$ (jumlah variabel bebas), $N=48$ (jumlah seluruh sampel penelitian) adalah $d_u=1,6231$ dan $d_l=1,4500$. Selanjutnya diketahui bahwa $d_u=1,6231$ lebih besar dari nilai Durbin Watson 1,486 dan nilai DW lebih kecil dari $4-d_u$ yaitu sebesar 2,3769. Maka dapat disimpulkan berdasarkan tabel pengambilan keputusan bahwa terjadi autokorelasi.

Koefisien Regresi

Tabel 4.2 Hasil Uji Regresi Linier BergandaCoefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	79906187745	40869632527		1,955	,057
	Pajak Kendaraan Bermotor	1,913	,413	,587	4,637	,000
	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	,045	,474	,012	,095	,925

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber : Data yang diolah dari SPSS versi 20, 2017

Berdasarkan hasil analisis regresi seperti tertera pada ringkasan tabel 4.2 diatas, maka diperoleh bentuk persamaan regresi linearnya yang distandarkan sebagai berikut:

$$Y' = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y' \text{ PAD} = 79906187745 + 1,913 \text{ PKB} + 0,045 \text{ BBNKB} + e$$

Dari persamaan diatas, dapat diartikan bahwa:

1. Nilai konstanta (a) adalah 79906187745. Artinya jika Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor nilainya adalah 0 maka tingkat Pendapatan Asli Daerah nilainya negatif, yaitu 79906187745.
2. Nilai koefisien regresi variabel Pajak Kendaraan Bermotor (b_1) bernilai positif, yaitu 1,913 atau

191,3% . Artinya bahwa setiap peningkatan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 1 persen (%) maka tingkat Pendapatan Asli Daerah (Y) juga akan meningkat sebesar 191,3%. Namun sebaliknya, jika Pajak Kendaraan Bermotor turun 1%, maka Pendapatan Asli Daerah (Y) diprediksi akan mengalami penurunan sebesar 191,3%.

Nilai koefisien regresi variabel Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (b_2) bernilai positif, yaitu 0,045 atau 4,5%. Artinya bahwa setiap peningkatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 1% maka tingkat Pendapatan Asli Daerah (Y) juga akan meningkat sebesar 4,5%. Namun sebaliknya, jika Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor turun 1%, maka Pendapatan Asli Dearah (Y) diprediksi akan mengalami penurunan sebesar 4,5%.

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4.3 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,583 ^a	,340	,311	27029479123,7421

a. Predictors: (Constant), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor

b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber : Data yang diolah dari SPSS versi 20, 2017

Berdasarkan tabel 4.3 diketahui bahwa koefisien determinasi (*R Square*) adalah sebesar 0,340 atau 34%. Artinya variabel Pendapatan Asli Daerah (Y) dijelaskan atau dipengaruhi sebesar 34% oleh variabel Pajak Kendaraan Bermotor (X_1) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X_2),

sedangkan sisanya sebesar (100%-34%=66%) dijelaskan oleh variabel lain diluar pengujian.

Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji t)

Hasil Uji t (uji parsial) tampak pada tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4 Hasil Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	79906187745	40869632527		1,955	,057
	Pajak Kendaraan Bermotor	1,913	,413	,587	4,637	,000
	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	,045	,474	,012	,095	,925

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber : Data yang diolah dari SPSS versi 20, 2017

Berdasarkan hasil pengujian parsial dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Variabel Pajak Kendaraan Bermotor yang memiliki nilai $t_{hitung} 4,637 > t_{tabel} 2,014$. Berdasarkan hipotesis penelitian H_1 diterima. Dan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikansi α 5% yaitu $0,000 < 0,05$. Artinya dapat disimpulkan bahwa secara parsial

variaebel independen yakni Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen yakni Pendapatan Asli Daerah.

2. Variabel Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam penelitian ini nilai $t_{hitung} 0,095 < t_{tabel} 2,014$. Dengan demikian maka berdasarkan hipotesis penelitian H_2 ditolak. Dan dengan nilai

signifikansi lebih besar dari tingkat signifikansi α 5% yaitu $0,925 > 0,05$. Artinya dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel independen yakni Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yakni Pendapatan Asli Daerah.

Uji Simultan (Uji F)

Untuk mengetahui apakah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan uji F. Dari hasil pengolahan data pada tabel dibawah ini dapat diketahui hasil uji F (uji simultan) sebagai berikut:

Tabel 4.5 Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,694E+22	2	8,471E+21	11,595	,000 ^b
	Residual	3,288E+22	45	7,306E+20		
	Total	4,982E+22	47			

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

b. Predictors: (Constant), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor

Sumber : Data yang diolah dari SPSS versi 20, 2017

Berdasarkan tabel 4.5 diketahui bahwa F_{hitung} sebesar 11,595 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Nilai F_{hitung} tersebut dibandingkan dengan nilai F_{tabel} , dimana jumlah variabel bebas (k) = 2, dan jumlah sampel (N) = 48. Maka diperoleh $df_1 = 2$ dan $df_2 = 45$ yang menghasilkan nilai F_{tabel} sebesar 3,204. Maka hal ini menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} memiliki nilai yang lebih besar dari nilai F_{tabel} ($11,595 > 3,204$). Dan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikansi α 5% yaitu $0,000 < 0,05$. Artinya dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hipotesis penelitian H_1 diterima. Artinya secara simultan variabel independen yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah memiliki keterkaitan dengan Pajak Kendaraan Bermotor. Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa "Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor".

Dari hasil pengujian secara parsial dengan menggunakan uji t , variabel Pajak Kendaraan Bermotor yang memiliki nilai t_{hitung} $4,637 >$ nilai t_{tabel} 2,014. Berdasarkan hipotesis penelitian H_1 diterima. Artinya dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel independen yaitu Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah. Hasil uji ini mendukung teori menurut Mardiasmo (2011: 12) yang menyatakan bahwa pajak daerah yang salah satunya PKB merupakan pajak yang telah ditetapkan dan dipungut oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah

dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran rumah tangga pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Hasil uji ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Wahfar (2014: 77) yang menyatakan bahwa, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan hasil perhitungan diperoleh t_{hitung} $5,431 >$ t_{tabel} $1,895$ dan nilai $Sig = 0,001 < \alpha = 0,05$. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Winarso (2015: 26) yang menyatakan bahwa PKB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, dengan hasil perhitungan diperoleh t_{hitung} $12,184 >$ t_{tabel} $2,0738$ dan nilai Sig $0,00 < \alpha = 0,05$. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Margaretha Angraini (2016: 9) yang menyatakan bahwa, PKB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, dengan nilai hasil uji t_{hitung} $8,489$ yang lebih besar dari t_{tabel} senilai $1,69092$, dan nilai $Sig = 0,00 < \alpha = 0,05$. Hal ini berarti meningkatnya penerimaan PKB menyebabkan kenaikan pada PAD. Pertumbuhan pesat jumlah kendaraan bermotor yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan ternyata diikuti juga dengan pertumbuhan penerimaan PKB, dan setiap tahun pemilik motor wajib membayar PKB. Penerimaan PKB tersebut merupakan penghasilan dari pajak daerah yang ikut serta mempengaruhi PAD. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ruslinda Agustina (2015: 97) juga menyatakan bahwa PKB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, dengan nilai hasil uji t_{hitung} $2,989 >$ t_{tabel} $2,365$ dan nilai Sig $0,020 < \alpha = 0,05$. Jadi dapat mengindikasikan bahwa secara rasionalisasi PKB berpengaruh positif terhadap PAD, karena PKB merupakan pajak tahunan yang diterima pemerintah provinsi. Semakin tinggi PKB ini maka semakin baik dalam mengelola PAD.

Pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Menurut Perda Sumatera Selatan No.3 Tahun 2011, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan atau penggantian hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat yang terjadi dari perjanjian dua pihak atau sepihak atau keadaan yang terjadi karena transaksi jual beli, warisan, tukar menukar, hibah, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab (Hamzah, 2014). Selain Pajak Kendaraan Bermotor terdapat juga biaya yang dikategorikan sebagai penambah Pendapatan Asli Daerah untuk urusan kendaraan bermotor yaitu Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Secara parsial dengan menggunakan uji t, variabel Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam penelitian ini memiliki nilai $t_{hitung} > 0,095 < t_{tabel} 2,014$. Dengan demikian maka berdasarkan hipotesis H_2 ditolak. Artinya dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel independen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Anggraini (2015: 9) yang menyatakan bahwa variabel independen yaitu Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah, dengan hasil perhitungan uji $t_{hitung} -0,095 < t_{tabel} 1,69092$, dan nilai Sig sebesar $0,925 > Sig \alpha = 0,05$, hal ini berarti besar kecilnya penerimaan pajak BBNKB tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan pada PAD. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Agustina (2015: 16) yang menyatakan bahwa variabel independen yaitu Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah, dengan hasil perhitungan uji $t_{hitung} 1,220 < t_{tabel} 2,228$, dan nilai Sig $0,262 > Sig \alpha = 0,05$, hal ini terjadi karena BBNKB merupakan biaya balik nama saat peralihan kepemilikan atau jual beli kendaraan bermotor sehingga penerimaan BBNKB kadang naik dan kadang turun berdasarkan jual beli yang terjadi setiap tahun. Sehingga BBNKB dipengaruhi besarnya penjualan kendaraan motor. Walaupun jumlah kendaraan bermotor yang beredar di jalan banyak namun besarnya BBNKB tergantung transaksi jual beli motor. Hal ini terjadi karena kemungkinan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan lebih memilih membeli kendaraan baru sehingga jumlah kendaraan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup drastis dibandingkan membeli atau membalik

nama kendaraan bekas. Maka dapat disimpulkan hipotesis kedua yang menyatakan bahwa BBNKB berpengaruh positif terhadap PAD tidak dapat diterima.

Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, bahwa Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan salah satu objek pajak dan mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan karena merupakan sumber pendapatan daerah.

Disadari dengan adanya peningkatan sumber pendapatan asli daerah, maka pembangunan daerah akan semakin berjalan dengan lancar. Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Dengan membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, diharapkan akan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya di Sumatera Selatan.

Berdasarkan hasil pengujian secara bersama-sama atau secara simultan dengan melakukan uji-F, bahwa nilai $F_{hitung} 11,595 > F_{tabel} 3,204$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Maka hal ini menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} memiliki nilai yang lebih besar dari nilai F_{tabel} . Dan dengan nilai Sig lebih kecil dari tingkat Sig α 5% yaitu $0,000 < 0,05$. Artinya dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hipotesis penelitian H_3 diterima. Artinya secara simultan variabel independen yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Selatan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukandapat di tarik simpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Pajak Kendaraan Bermotor memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2013-2016, hal ini disebabkan terjadi peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang cukup tinggi di Sumatera Selatan setiap tahunnya.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2013-2016, karena besarnya penerimaan BBNKB tergantung pada transaksi jual beli motor bekas sehingga BBNKB tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap PAD.

3. Secara simultan terdapat pengaruh secara positif dan signifikan antara Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2013-2016, hal ini disebabkan oleh tingginya jumlah pertumbuhan kendaraan bermotor setiap tahunnya di Provinsi Sumatera Selatan.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Ruslinda. 2015. Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 8 No. 1 Maret 2015.
- Altius, Herline Yudhah, Erlina, dan H.B Tarmizi. 2013. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap PAD dan Dampaknya Bagi Pengembangan Wilayah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonom*. Vol 16 No. 3/ Diakses tanggal 06 Februari 2017.
- Anggraini, Margaretha, Anton Arisman, dan Christina Yunita. 2016. Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonom*/ Diakses tanggal 08 Februari 2017.
- Eryandi, Gusti, Lizar Alfansi, dan Benardin. 2008. Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Bengkulu. *Jurnal Ekonomi*. Volume 04 Nomor 02/ Diakses tanggal 06 Februari 2017.
- Halim, Abdul, Icut Rangga Bawono, dan Amin Dara. 2014. *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Edisi 2. Jakarta : Penerbit Salemba.
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2016. *Modul Pelatihan Pajak Terapan*. Cetakan ke-32. Jakarta.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2002. *Metode Penelitian Bisnis*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah.
- _____. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- _____. 2009. Undang-Undang Nomor 28 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- _____. 1983. Undang-Undang Nomor 6 Menganut Tentang *Self Assesment System*.
- _____. 2007. Undang-Undang Nomor 28 Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Priyatno, Duwi. 2012. *Cara Kilat Belajar Analisis Data Dengan SPSS 20*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Rompis, Natalia Ester, Ventje Ilat, dan Anneke Wangkar. 2015. Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Studi Kasus Pada SAMSAT Airmidi). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Volume 15 No.03 Tahun 2015/Diakses tanggal 03 Februari 2017.
- Sanusi, Anwar. 2011. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan Keempat. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Savitri, Enni, and Musfialdy. 2015. The Effect of Taxpayer Awareness, Tax Socialization, Tax Penalties, Compliance Cost at Taxpayer Compliance with Service Quality as Mediating Variable. *International Journal of Global Conference on Business and Social Science*. Kuala Lumpur, Malaysia/ Diakses tanggal 20 Maret 2017.
- Soeratno, dan Lincolin Arsyad. 2008. *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Bisnis*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit UPP STIM YKPN.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Syafruddin, Faisal. 2002. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta. *Tesis*. Universitas Indonesia. Jakarta. Diambil dari : <http://lib.ui.ac.id/opac/ui/detail.jsp?id=75485&lokasi=lokal>.
- Wahfar, Rakhmad Rinaldi, Abubakar Hamzah, dan Mohd. Nur Syechalad. 2014. Analisis Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Sebagai Salah Satu Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pidie. *Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. Volume 2 No. 1/Diakses tanggal 02 Februari 2017.
- Winarso, Widi. 2015. Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Kantor CP Dispenda). *Prosiding SNIT 2015*/Diakses tanggal 02 Februari 2017.
- Yuskar, Febri Yanti. 2014. Analisis Efektivitas dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Sumatera Barat. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*. Volume 14 No.2/Diakses tanggal 02 Februari 2017.
- Zain, Mohammad. 2013. *Manajemen Perpajakan*. Edisi 3. Salemba Empat.

Zulkifli. 2013. Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Provinsi
Gorontalo.
[http://zulkifli.wordpress.com/2011/2012-kotribusi-PKB-BBNKB-terhadap-PAD/Diakses tanggal 29 Januari 2017](http://zulkifli.wordpress.com/2011/2012-kotribusi-PKB-BBNKB-terhadap-PAD/Diakses_tanggal_29_Januari_2017)